

ABSTRAK

KEWENANGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI LAMPUNG DALAM AUDIT INVESTIGATIF TERKAIT DENGAN KERUGIAN NEGARA

Oleh:

ZIDNADIA AL-HUSNA

Audit investigatif merupakan instrumen penting dalam pengawasan keuangan negara dan berperan strategis dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Kewenangan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPKP memiliki kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31/PUU-X/2012. Meski demikian, terdapat kesenjangan berupa dualisme kewenangan dengan BPK, perbedaan tempo penyelesaian audit, serta hambatan empiris seperti keterbatasan bukti formil dan potensi intervensi penyidik untuk menyelamatkan pihak tertentu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah kewenangan BPKP Provinsi Lampung dalam audit investigatif terkait dengan kerugian negara? dan (2) bagaimana implikasi kewenangan audit investigatif BPKP Provinsi Lampung terhadap penegakan hukum atas kerugian negara?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan meliputi studi pustaka dan studi lapangan. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kewenangan BPKP Provinsi Lampung meliputi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan keuangan di daerah sebagaimana sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP dan (2) implikasi pelaksanaan audit investigatif sangat signifikan, antara lain mempercepat proses penyidikan, memberikan dasar objektif untuk menetapkan kerugian negara, memperkuat pembuktian di pengadilan melalui keterangan ahli auditor, serta mendukung pemulihan kerugian negara. Audit Investigatif juga memperkuat sinergi antara BPKP dan aparat penegak hukum serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Kata Kunci: Audit Investigatif, BPKP, Kerugian Negara, Penegakan Hukum, Keuangan Negara

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE FINANCIAL AND DEVELOPMENT SUPERVISORY AGENCY (BPKP) OF LAMPUNG PROVINCE IN INVESTIGATIVE AUDITS RELATED TO STATE FINANCIAL LOSSES

By:

ZIDNADIA AL-HUSNA

Investigative audit is an important instrument in state financial supervision and plays a strategic role in proving corruption crimes that cause state losses. This authority is based on Law Number 15 of 2004 concerning the Audit, Management, and Accountability of State Finance. BPKP has the authority to conduct investigative audits based on Presidential Regulation Number 192 of 2014 and strengthened by Constitutional Court Decision Number 31/PUU-X/2012. However, there is a legal gap, including overlapping authority with BPK, differences in audit completion time, limited formal supporting evidence, and potential intervention from investigators to protect certain parties.

This study aims to examine: (1) the authority of BPKP Lampung Province in conducting investigative audits related to state losses, and (2) the implications of BPKP's investigative audit authority on law enforcement regarding state financial losses. This research applies normative juridical and empirical juridical methods. The data used consists of literature study and field study. The data is analyzed using a descriptive qualitative approach.

The results show that: (1) BPKP Lampung Province has the authority to supervise and control regional financial management, based on Article 3 of Presidential Regulation Number 192 of 2014 on BPKP; and (2) investigative audits have strong impacts, such as speeding up investigations, giving an objective basis to determine state losses, strengthening evidence in court through auditor expert testimony, and helping recover state losses. Investigative audits also strengthen cooperation between BPKP and law-enforcement agencies and improve local government governance.

Keywords: *Investigative Audit, BPKP, State Losses, Law Enforcement, State Finances.*